

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Masalah pemerataan pendidikan berkaitan dengan upaya sistem pendidikan dalam memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh peserta didik untuk mengakses pendidikan. Hal ini bertujuan agar pendidikan dapat menjadi sarana dalam pengembangan sumber daya manusia guna mendukung pembangunan nasional. (Tirtarahardja dalam Patandung & Panggua, 2022). Masalah pemerataan pendidikan menjadi salah satu isu yang harus ditangani dengan serius, agar masyarakat Indonesia dapat mengakses pendidikan dengan mudah baik program wajib belajar selama 12 tahun sampai dengan pendidikan tinggi.

Keberhasilan pendidikan di Indonesia bergantung dengan kebijakan pendidikan yang diterapkan. Namun kebijakan pendidikan di Indonesia belakangan ini masih memunculkan permasalahan, terutama di Pendidikan Tinggi. Kebijakan pendidikan tinggi saat ini dinilai masih terdapat berbagai masalah, salah satu permasalahannya adalah pada tingginya biaya pendidikan tinggi. Menurut Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa mengatakan bahwa :

“Mahalnya biaya pendidikan tinggi itu dapat menghambat pencapaian target pemerintah dalam meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi”

*Sumber : [emedia.dpr.go.id](https://emedia.dpr.go.id).2024*

Kenaikan biaya pendidikan tinggi akan menghambat masyarakat dalam mengakses pendidikan tinggi karena keterbatasan biaya, disisi lain juga bisa

menyebabkan kegagalan pemerataan dalam bidang pendidikan. Sejalan dengan itu, Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda (19/5/2024) mengatakan bahwa :

“Pemerintah gambar-gembor ingin mewujudkan Indonesia emas 2045 dengan memanfaatkan bonus demografi agar tidak terjadi bencana demografi, tetapi saat ada keluhan biaya kuliah yang tinggi dari mahasiswa dan masyarakat seolah ingin lepas tangan”.

*Sumber : emedia.dpr.go.id.2024*

Dari pernyataan pendapat tersebut maka menggambarkan bahwa kebijakan pendidikan tinggi masih mengalami berbagai permasalahan salah satunya tingginya biaya pendidikan yang menyebabkan masyarakat tidak bisa mengakses pendidikan tinggi secara merata.

### **Gambar 1. 1 Masalah Pemerataan Pendidikan**



*Sumber : Kompasiana.com dan Quora \_akses pendidikan belum merata 2024*

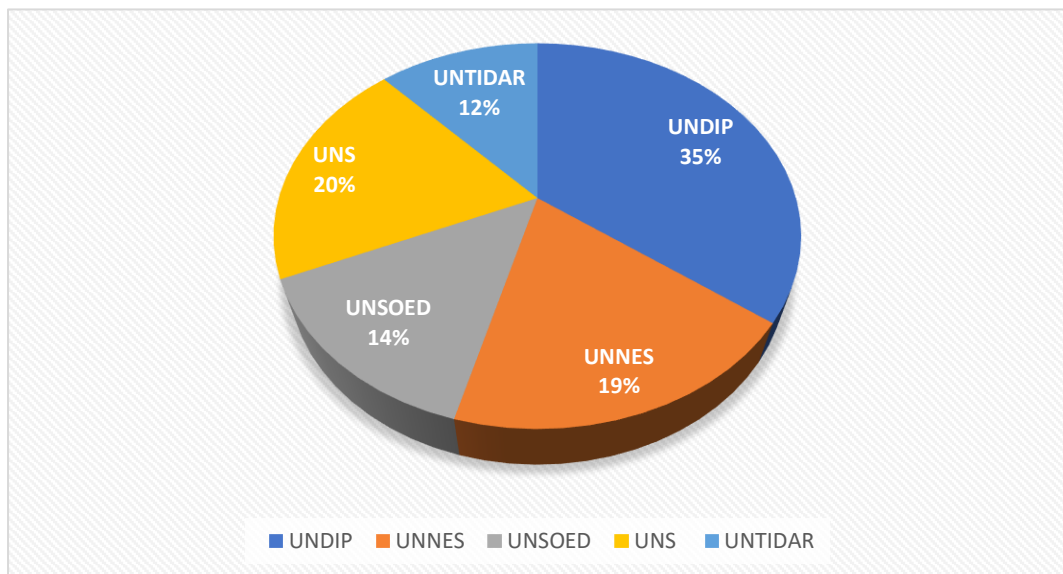
Permasalahan pendidikan di Indonesia adalah pada pemerataan akses pendidikan dan tingginya biaya pendidikan, meskipun pemerintah sudah berupaya memberikan akses pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia, namun hal ini belum bisa terlaksana sepenuhnya karena keadaan ekonomi masyarakat yang berbeda-beda, salah satunya pada Kemiskinan. Kemiskinan dan pendidikan adalah dua aspek yang memiliki kaitan sangat erat apabila digabungkan dengan kesejahteraan yang ada di masyarakat. (Rohaeni & Saryono, 2018). Kemiskinan dapat membatasi

akses masyarakat terhadap pendidikan, padahal pendidikan sendiri bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menjadi jalan keluar dari kemiskinan. Kemiskinan inilah yang menyebabkan pemerataan pendidikan masih kurang terlaksana dan masih menjadi isu masalah pendidikan Indonesia yang hangat menjadi perbincangan dikalangan masyarakat (Sulaiman, 2019).

Biaya pendidikan kerap menjadi permasalahan penting bagi mayoritas masyarakat, khususnya masyarakat kelas menengah kebawah. Saroni (2013:27) menuturkan bila masyarakat yang kerap menjadi korban akibat pembiayaan pendidikan yang kerap meningkat ialah masyarakat kelas menengah kebawah, masyarakat ini kerap merelakan diri untuk menyaksikan kondisi pendidikan di Indonesia yang makin hari mengalami kenaikan biaya. Bagi pihak yang mengalami kesulitan finansial, tentu untuk memperoleh pendidikan menjadi sesuatu yang sulit. Pastinya kondisi ini menyebabkan mereka kecewa terhadap situasi maupun kebijakan yang dirancang pemerintah.

Menyikapi permasalahan tersebut pemerintah berupaya memberikan akses pendidikan yang sama kepada seluruh masyarakat Indonesia, yaitu dengan meluncurkan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah di perguruan tinggi. Program ini sebagai usaha yang pemerintah laksanakan di perguruan tinggi guna membangun generasi yang lebih unggul dan memperoleh kelayakan pendidikan. Program KIP Kuliah memiliki manfaat yang besar, dimana dalam program ini memuat pembiayaan pendidikan dan biaya hidup sampai waktu yang telah ditentukan, sehingga semua Universitas mengimplementasikanya.

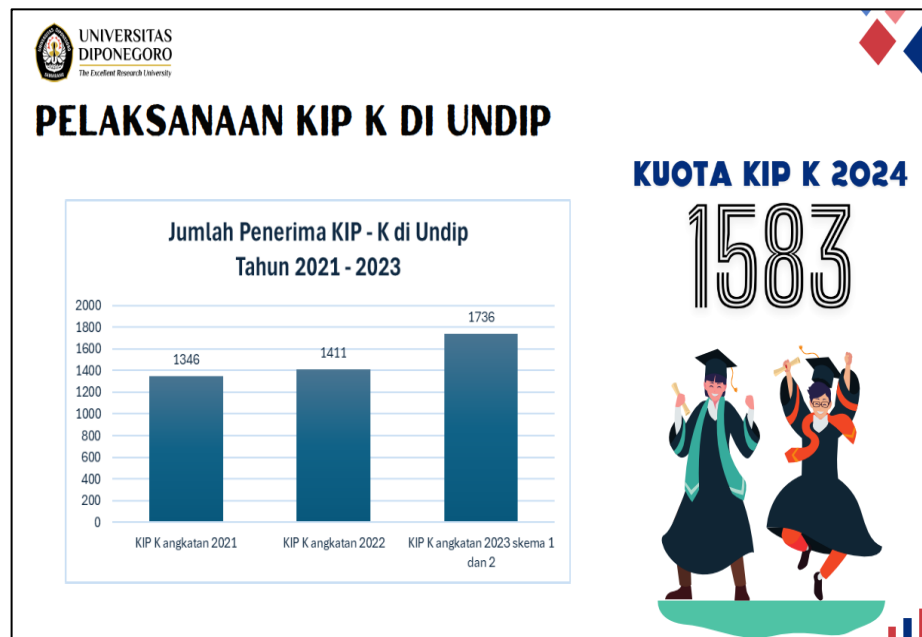
**Gambar 1. 2 Data Kuota KIP-Kuliah PTN di Jawa Tengah**



*Sumber : Diolah penulis dari website masing-masing PTN terkait 2024*

Program KIP Kuliah diberikan pada seluruh perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di seluruh Indonesia, salah satu bentuk implementasi program KIP Kuliah adalah pada Universitas Diponegoro yang memiliki kuota tertinggi pada universitas negeri di Provinsi Jawa Tengah yaitu 1736, dan berhasil menyaingi perguruan tinggi negeri lainya seperti Unnes (940 mahasiswa penerima KIP), UNS (974 mahasiswa penerima KIP), Unsoed (700 mahasiswa penerima KIP), dan Untidar (587 mahasiswa penerima KIP). Besarnya kuota penerima KIP Kuliah yang diberikan pada Universitas Diponegoro, disesuaikan dengan jumlah dan kebutuhan mahasiswa yang besar sehingga banyak mahasiswa yang berhak memperoleh beasiswa KIP Kuliah di lingkungan Universitas Diponegoro. Adapun kuota penerima KIP Kuliah di Undip sebagai berikut :

**Gambar 1. 3 Data Penerima KIP Kuliah UNDIP**



*Sumber : Biro Akademik dan Kemahasiswaan Undip 2024*

Persesjen KemendikbudRistek Nomor 13 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan Program Indonesia Pintar (KIP) di Pendidikan Tinggi, PIP di pendidikan tinggi bertujuan untuk membantu biaya hidup, biaya pendidikan, dan biaya pengelolaan dalam rangka : (1) Meningkatkan perluasan akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi bagi Mahasiswa warga negara Indonesia yang tidak mampu secara ekonomi, (2) Meningkatkan prestasi Mahasiswa pada bidang akademik dan non akademik, (3) Menjamin keberlangsungan studi Mahasiswa yang berasal dari daerah 3T, (4) Meningkatkan angka partisipasi kasar Pendidikan Tinggi.

Merujuk pada regulasi tersebut, maka pelaksanaan program KIP Kuliah di Undip harus sesuai regulasi yang telah ditentukan dalam rangka mencapai program

yang berdampak. Namun pada fakta lapangan, program KIP Kuliah di Undip masih dibarengi dengan berbagai permasalahan yang menghambat pencapaian program yang berdampak. Adapun permasalahan yang ditemukan sebagai berikut.

**Gambar 1. 4 Penyalahgunaan Bantuan KIP Kuliah Undip**



*Sumber : detik.com.2024*

Permasalahan pertama adalah Penyalahgunaan program memiliki hubungan dengan faktor keberhasilan program yaitu pemahaman program. Suatu program dapat dikatakan berhasil apabila pemberiannya tepat pada kelompok sasaran Sutrisno (2007). Fenomena mahasiswa yang tidak bisa memanfaatkan biaya bantuan dengan semestinya seringkali terjadi diberbagai perguruan tinggi lainnya, tidak hanya di Undip, hal ini berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa penyalahgunaan bantuan terjadi karena berbagai faktor.

**Tabel 1. 1 Jumlah Mahasiswa KIP-K yang mengalami Kemunduran Prestasi Akademik Angkatan Tahun 2021-2023**

| No           | Asal Fakultas                          | Jumlah Mahasiswa |
|--------------|----------------------------------------|------------------|
| 1            | Fakultas Sains dan Matematika 13       | 13               |
| 2            | Fakultas Teknik 9                      | 9                |
| 3            | Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan 5 | 5                |
| 4            | Fakultas Ekonomika dan Bisnis 3        | 3                |
| <b>Total</b> |                                        | <b>30</b>        |

*Sumber : Diolah dari Biro Akademik dan Kemahasiswaan Undip 2024*

Merujuk pada data tabel 1.1, diketahui bahwa di Undip terdapat mahasiswa penerima KIP Kuliah yang mengalami kemunduran prestasi akademik yang tersebar dari empat fakultas. Prestasi akademik yang dimaksud merupakan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), dimana dalam regulasi yang mengatur terdapat minimum Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang harus dipenuhi oleh mahasiswa KIP Kuliah. Kemunduran ini tentunya menghambat pencapaian program KIP Kuliah yang berdampak. Kemunduran IPK yang telah melebihi batas waktu yang ditentukan juga bisa berefek pada pemberhentian status penerima KIP Kuliah.

**Tabel 1. 2 Data Mahasiswa yang Cuti dan Dihentikan sebagai Penerima KIP-K**

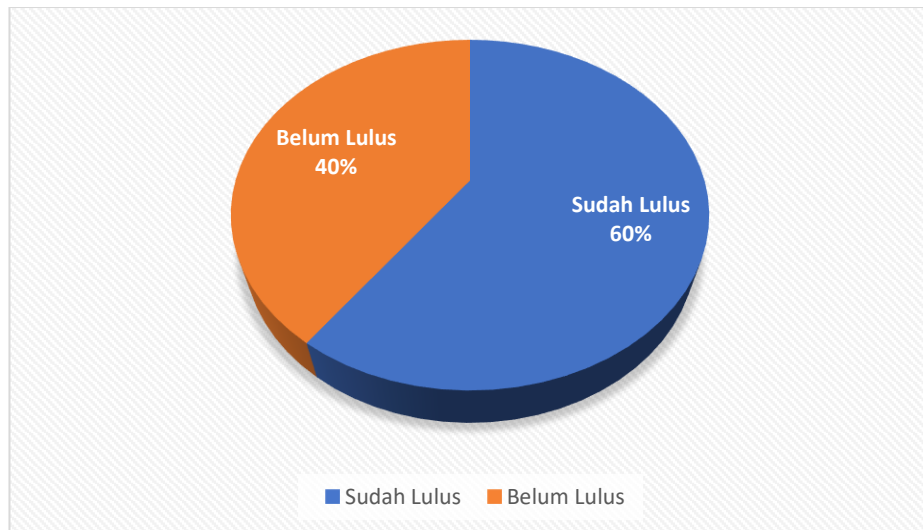
| TAHUN 2022 |                         |                  |                      |
|------------|-------------------------|------------------|----------------------|
| No         | Tahun Angkatan          | Jumlah Mahasiswa | Keterangan           |
| 1          | KIP-K Angkatan 2020     | 1                | Cuti ingin istirahat |
| 2          | KIP-K Angkatan 2020     | 4                | Dihentikan           |
| 3          | KIP-K Angkatan 2021     | 9                | Dihentikan           |
| TOTAL      |                         | 14               |                      |
| TAHUN 2023 |                         |                  |                      |
| No         | Tahun Angkatan          | Jumlah Mahasiswa | Keterangan           |
| 1          | Bidikmisi Angkatan 2019 | 2                | Dihentikan           |
| 2          | KIP-K Angkatan 2020     | 2                | Dihentikan           |
| 3          | KIP-K Angkatan 2021     | 9                | Dihentikan           |
| 4          | KIP-K Angkatan 2021     | 1                | Cuti                 |
| 5          | KIP-K Angkatan 2022     | 18               | Dihentikan           |
| TOTAL      |                         | 32               |                      |

*Sumber : Dolah penulis dari BAK Undip 2024*

Tabel 1.2 menjelaskan bahwa masih terdapat mahasiswa yang cuti dan dihentikan. Menurut informasi yang disampaikan oleh pihak Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) Undip, dihentikanya status mahasiswa penerima KIP Kuliah tersebut disebabkan berbagai faktor diantaranya yaitu, adanya pengunduran diri mahasiswa, penurunan IPK yang terus menerus dan perubahan ekonomi yang

lebih baik. Permasalahan selanjutnya yaitu, dalam regulasi diatur bahwa masa pemberian beasiswa maksimal 8 semester dan diharapkan bisa lulus tepat waktu, namun di Undip masih terdapat mahasiswa yang melebihi batas waktu studi.

**Gambar 1. 5 Data Presentase Kelulusan Mahasiswa KIP-K Angkatan 2020**



*Sumber : Diolah penulis dari BAK Undip 2024*

Penerima KIP Kuliah pada angkatan tahun 2020 berjumlah 1.241 mahasiswa penerima. Apabila disesuaikan dengan waktu pemberian bantuan, maka mahasiswa angkatan 2020 harus bisa menyelesaikan masa studinya tepat waktu, namun berdasarkan data diatas diketahui bahwa mahasiswa angkatan 2020 yang berhasil menyelesaikan masa studi dengan tepat waktu hanya 744 mahasiswa atau sekitar 60%, dan jumlah mahasiswa yang belum menyelesaikan studi tepat waktu yaitu 497 atau sekitar 40%.

Selain itu, untuk alumni penerima beasiswa KIP Kuliah tidak dilakukan monitoring kembali, padahal peran dan kontribusi mereka dapat memutus rantai kemiskinan sebagaimana yang tertuang dalam tujuan Program KIP Kuliah.

Berdasarkan permasalahan tersebut, program KIP Kuliah di Universitas Diponegoro harus segera dilakukan evaluasi, karena apabila tidak tentu akan menghambat keberhasilan program serta menimbulkan dampak yang tidak diinginkan dan berpengaruh pada kelanjutan pendidikan mahasiswa. Rossi dan Freeman dalam Parson (2008: 604) mengungkapkan bahwa penilaian atas dampak berfungsi untuk mengetahui apakah intervensi tersebut memberikan efek yang diinginkan atau tidak. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian terdahulu mengenai pentingnya melakukan evaluasi dampak.

Penelitian yang dilakukan oleh Byantoro, dkk Tahun 2024 yang berjudul *“View The Impact of Scholarship on Student Achievement : Mix Method Study”* mengatakan bahwa evaluasi dampak beasiswa sangat penting untuk dilakukan guna mengetahui apakah dengan adanya program beasiswa bisa memberikan efek yang diharapkan.

Oleh karena itu, Penelitian tentang evaluasi dampak Program KIP Kuliah sangat penting untuk dilakukan, hal ini juga sebagai penjawab atas permasalahan KIP Kuliah yang ada di Universitas Diponegoro sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam masalah program tersebut dengan mengambil judul penelitian *“Evaluasi Dampak Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah di Universitas Diponegoro”*.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Merujuk pada latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang terdapat dipenelitian ini sebagai berikut :

1. Terdapat mahasiswa KIP-K Undip yang menyalahgunakan bantuan
2. Terdapat mahasiswa KIP-K Undip yang belum lulus/melebihi batas studi
3. Terjadinya penurunan prestasi akademik atau non akademik
4. Terdapat mahasiswa KIP-K Undip yang mengundurkan diri dan dinonaktifkan sebagai penerima
5. Terdapat mahasiswa KIP-K Undip yang melakukan Cuti
6. Belum adanya monitoring alumni penerima KIP-K

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut

1. Bagaimana Dampak Program KIP Kuliah bagi kelanjutan pendidikan di Universitas Diponegoro?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi keberhasilan program KIP Kuliah di Universitas Diponegoro?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini ialah suatu keinginan yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Adapun tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Menganalisis Dampak Program KIP Kuliah bagi kelanjutan pendidikan di Universitas Diponegoro, dengan melihat indikator evaluasi dampak sebagai berikut :
  - a. Dampak Individu
  - b. Dampak Organisasi
  - c. Dampak Ekonomi
  - d. Dampak Masyarakat
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program KIP Kuliah di Universitas Diponegoro

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Melalui uraian dan pembahasan dalam penelitian ini, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih pengembangan Ilmu Administrasi Publik mengenai evaluasi dampak program

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini digunakan sebagai sarana proses pembelajaran untuk menambah wawasan, dan mengetahui cara mengukur tingkat keberhasilan program dengan menggunakan metode evaluasi dampak.

- b. Bagi Instansi Terkait

Penelitian ini sebagai sarana evaluasi dan masukan pada Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) Universitas Diponegoro,

Kemendiktisaintek, maupun instansi terkait, untuk mempertimbangkan pembuatan kebijakan yang ideal dan efisien khususnya pada evaluasi dampak program KIP Kuliah di lingkungan Universitas Diponegoro

## 1.6 Kajian Teori

### 1.6.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan perbandingan dalam penelitian ini, serta untuk membedakan penelitian ini terhadap penelitian-penelitian terdahulu. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Evaluasi Dampak Program KIP Kuliah di antaranya sebagai berikut.

**Tabel 1. 3 Penelitian Terdahulu**

| No | Peneliti/Tahun                                                               | Fokus Kajian                                                                              | Metode dan Teori                                                                                                                                                        | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Fatimah Sariri, Indah Prabawati. 2024                                        | Mengevaluasi Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) di Universitas Negeri Surabaya | Deskriptif Kualitatif<br><br>1. Kebijakan Publik<br>2. Evaluasi Kebijakan William N Dun (2003); Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Ketepatan, Responsivitas | Program KIP Kuliah di Unesa telah dijalankan sesuai dengan Persesjen No 10 Tahun 2022. Proses penetapan mahasiswa penerima KIP dengan adanya survey langsung dan proses wawancara melalui online. Hambatan yang mempengaruhi program ini yaitu pada terbatasnya sumber daya pengelola dan masih terdapat pemalsuan data. |
| 2  | Erli Harliana, Heru Purnawan. 2022. <i>Jurnal Ilmiah Administrasi Publik</i> | Mengevaluasi Pelaksanaan KIP Kuliah Tahun 2022 Studi di Universitas                       | Kualitatif<br><br>1. Evaluasi Program CIPP Daniel Stufflebeam                                                                                                           | Pelaksanaan Program KIP-K di Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Evaluasi dilakukan dengan indikator model evaluasi CIPP. Disimpulkan bahwa pengelola telah                                                                                                               |

|   |                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <i>"Masyarakat Demokrasi"</i>                                 | Prof. Dr. Hazairin, SH (Bengkulu)                                                                       | (1966); Context, Input, Process, Product                                                                                                                             | melakukan pelayanan dengan baik, namun masih terdapat mahasiswa yang tidak bisa memanfaatkan biaya dengan semestinya, kemudian, praktik orang dalam pada penetapan KIP juga ada, dan dampak atas pendidikan belum sepenuhnya tercapai sesuai ketetapan.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3 | Rauzalia. 2023. <i>Repository.ar.raniry</i>                   | Mengevaluasi Program Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) di UIN Ar-Raniry Banda Aceh         | Deskriptif Kualitatif<br><br>1. Kebijakan Publik<br>2. Evaluasi Program CIPP Daniel Stufflebeam (1966); Context, Input, Process, Product<br>3. Perlindungan Sosial   | Program KIP Kuliah di UIN Ar-Raniry Banda Aceh berdasarkan hasil evaluasi menurut indikator Stufflebeam sudah berjalan dengan baik. Adapun indikator tersebut sebagai berikut :<br>Context (Pergantian nama dari beasiswa bidikmisi ke KIP Kuliah berjalan dengan baik), Input (Pelaksanaan sudah diatur sesuai regulasi, Process (Belum sepenuhnya baik karena masih ada mahasiswa yang tidak selesai dalam akademik), Product (Sudah berjalan dengan baik hal ini karena banyak mahasiswa yang menjuarai event nasional) |
| 4 | Ajeng Diah, Difanda, Naila Ayu, Raihanah, Siti Neisyia. 2022. | Menganalisis Kebijakan Program Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) di Universitas Diponegoro | Deskriptif Kualitatif<br><br>1. Kebijakan<br>2. Kebijakan Publik<br>3. Proses Kebijakan, Thomas R Dye (1992:328); Identifikasi masalah, penyusunan agenda, perumusan | Program KIP Kuliah di Undip menjadi salah satu alternatif mewujudkan pendidikan bagi mahasiswa yang kurang mampu, namun pelaksanaan program KIP Kuliah di Undip belum sepenuhnya berjalan dengan baik karena ditemui berbagai permasalahan diantaranya, kurang jelasnya informasi dari kampus, ketidaktepatan waktu pengambilan dana, keterlambatan berkas pihak kampus pada                                                                                                                                               |

|   |                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                        |                                                                                                               | kebijakan, pengesahan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi kebijakan                                                                                                     | penerima, dan sistem birokrasi yang masih kaku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5 | Mohammad Dienul Haq, Sukidin, Pudjo Suharso. 2023. <i>Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial</i> | Mengevaluasi Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) di MtsN 5 Jember Tahun 2021  | Deskriptif Evaluatif<br>1. Evaluasi Program CIPP Daniel Stufflebeam (1966); Context, Input, Process, Product                                                                   | Pelaksanaan PIP di MtsN 5 Jember sudah berjalan baik. Hal ini dapat dilihat dengan terpenuhinya kebutuhan pendidikan siswa penerima PIP, berkurangnya angka putus sekolah di jember, dan meningkatnya siswa yang melanjutkan ke jenjang pendidikan atas.                                                                                                        |
| 6 | Abd. Rohim Asnawi, Bambang Budi Wiyono, Asep Sunandar. 2021. <i>Eajournal unnm.ac.id</i>                               | Policy Evaluation of the Program Indonesia Pintar (PIP) in Indonesia's Education Outcomes                     | Kuantitatif<br>1. Evaluasi Kebijakan Maulana & Nugroho 2019; 4 metode yaitu <i>single program after only, single program before after, comperative after only, comparative</i> | Program KIP memiliki tujuan untuk menaikkan taraf pendidikan bagi keluarga yang tidak mampu. Penelitian ini mengatakan bahwa program KIP hanya efektif dilakukan di jenjang SMP dan SMA. Kebijakan ini tidak mampu mengatasi siswa putus sekolah dan tidak bersekolah, hal ini disebabkan oleh lamanya dokumen persyaratan dan besaran dana bantuan yang kecil. |
| 7 | Wirasto Tri A., Sri Suwitri, Margaretha S., Dyah Hariani / 2023                                                        | Evaluasi dampak pelaksanaan kebijakan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kecamatan Banjarsari, Surakarta | Deskriptif Kualitatif<br>1. Pelaksanaan<br>2. Evaluasi Dampak oleh Finsterbusch and Motz (dalam Samodra                                                                        | Pelaksanaan kebijakan penyediaan RTH masih belum maksimal, dan belum sepenuhnya berdampak pada segala aspek. Aspek yang memiliki dampak paling menonjol disini adalah pada lingkungan yang mana masyarakat merasa terbantu dengan adanya RTH, dan perlu                                                                                                         |

|   |                                               |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                               | berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 Pasal 29                                                                                                        | Awibawa, 1994) ; Dampak individu, lingkungan, ekonomi, organisasi dan kelompok, masyarakat, dan sosial budaya                                                                                                                                                                                                                                                   | penambahan RTH. Selain itu, pada dampak ekonomi masyarakat merasa terbantu karena mereka bisa berjualan di area RTH dan meningkatkan pendapatan.<br>Faktor yang mempengaruhi evaluasi dampak ini yaitu pada keterbatasan anggaran untuk pembebasan lahan, kurangnya kesadaran masyarakat dan minimnya partisipasi publik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8 | Pandu Pratomo, Sri Suwitri, Ari Subowo / 2023 | Analisis dampak kebijakan penerimaan peserta didik SMP 3 Semarang terkait seleksi nilai prestasi dengan metode uji prestasi dan surat pernyataan | Deskriptif Kualitatif<br><br>1. Kebijakan Publik (Thomas R. Dye)<br>2. Analisis Kebijakan (William Dun 2003: 117-124)<br>3. Evaluasi Dampak Kebijakan.<br>(Menggunakan analisis dampak internal dan eksternal)<br><b>Menurut Dye, 1975 :</b><br>a. Dampak pada kelompok sasaran<br>b. Dampak diluar kelompok sasaran<br>c. Dampak sekarang dan yang akan datang | Penerapan kebijakan penerimaan peserta didik di SMP 3 Semarang terkait seleksi nilai prestasi dengan metode uji prestasi dan surat pernyataan setelah dievaluasi menggunakan instrumen dampak kebijakan maka dapat dikatakan bahwa evaluasi tersebut memberikan dampak positif dan negatif. Pada dampak positif dengan adanya kebijakan penerimaan siswa yang dibuat oleh SMP 3 Semarang berhasil mengurangi praktik kecurangan berupa manipulasi piagam prestasi oleh para wali murid, serta dapat menjaga integritas sekolah. Sedangkan pada dampak negatifnya yaitu adanya mekanisme tes uji prestasi membuat proses penerimaan siswa menjadi lama |

|   |                       |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                       |                                                                                                                                                                                 | <p>d. Dampak biaya langsung dan tak langsung</p> <p><b>Menurut Langbein Weiss, Dampak Internal :</b></p> <p>a. Ketersediaan data</p> <p>b. Lembaga/organisasi</p> <p><b>Menurut Finterbusch and motz :</b></p> <p>a. Lingkungan</p> <p>b. Masyarakat</p> <p>c. Psikologis</p> <p>d. Ekonomi</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9 | Alifiyah Rahma (2024) | Evaluasi Dampak Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak terhadap Pemenuhan Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif di Kota Depok | <p>Deskriptif kualitatif</p> <p>Evaluasi Dampak Finterbush and Motz (1993)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dampak individu</li> <li>2. Dampak organisasi</li> <li>3. Dampak lembaga sosial</li> <li>4. Dampak masyarakat</li> </ol>                                               | Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan kebijakan kota layak anak di Kota Depok sudah baik dan tepat sasaran sesuai regulasi, dan memberika dampak yang diinginkan yaitu menurunnya angka pernikahan dini. Hal yang perlu diperhatikan yaitu peran pemerintah yang kuat dalam mendorong penegakan regulasi |

|    |                         |                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | Byantoro Adjie.<br>2024 | The Impact of Scholarships on Student Achievement<br>A Mix Methods | Mix Method | <p>Hasil penelitian menunjukan bahwa dari adanya program beasiswa memiliki dampak pada</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• meningkatnya prestasi akademik mahasiswa, hal ini karena beasiswa dimanfaatkan sebagaimana mestinya seperti pembelian buku.</li> <li>• Beasiswa harus digunakan sebagaimana mestinya</li> <li>• Pentingnya bimbingan atau konseling yang terstruktur untuk penerima beasiswa guna menjaga akademik mereka</li> </ul> |
|----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*Sumber : Diolah oleh Penulis 2024*

Peneliti dalam penelitian ini memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Adapun penjelasan mendalam tentang perbedaan dan kontribusi penelitian terdahulu terhadap penelitian ini sebagai berikut :

Penelitian pertama oleh Fatimah Sariri, Indah Prabawati. 2024 dengan judul “Evaluasi Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) di Universitas Negeri Surabaya”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, sedangkan teori yang diambil adalah kebijakan publik dan evaluasi kebijakan. Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini terletak pada lokus dan konteks evaluasi kebijakan yang diambil dari tokoh yang berbeda. Pada penelitian terdahulu lebih menekankan pada proses pelaksanaan program KIP Kuliah, sedangkan fokus penelitian ini terletak dampak program KIP Kuliah. Kontribusi penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah pada proses pelaksanaan yang harus sesuai dengan prosedur agar berdampak pada program.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Erli Harliana, Heru Purnawan. 2022 dengan judul “Evaluasi Pelaksanaan KIP Kuliah Tahun 2022 Studi di Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, sedangkan teori yang diambil adalah evaluasi program. Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini terletak pada teori dan lokus. Kontribusi penelitian terdahulu terhadap penelitian ini yaitu dari segi pengelola dan penerima program harus dapat memahami tujuan program KIP Kuliah dan mematuhi segala ketentuannya sehingga akan berdampak sesuai dengan tujuan prrogram KIP Kuliah.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Rauzalia. 2023 dengan judul “Evaluasi Program Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) di UIN Ar-Raniry Banda Aceh”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif . Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada teori yang digunakan pada penelitian sebelumnya yaitu teori evaluasi CIPP dan perbedaan lain pada lokus penelitian. Kontribusi dari penelitian terdahulu terhadap penelitian ini adalah penggunaan indikator evaluasi yang sesuai akan menghasilkan simpulan evaluasi program dengan baik.

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Ajeng Diah, Difanda, Naila Ayu, Raihanah, Siti Neisyia. 2022 dengan judul “Analisis Kebijakan Program Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) di Universitas Diponegoro”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif . Teori yang diambil adalah teori kebijakan publik. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada konteks teori evaluasi. Kontribusi dari penelitian terdahulu disesuaikan dengan hasil penelitian bahwa kebijakan KIP Kuliah dilaksanakan untuk membantu mahasiswa kurang mampu di Undip dalam berkuliah, akan tetapi masih terdapat berbagai masalah, hal ini lah yang memberikan kontribusi untuk program KIP Kuliah dijalankan sebagaimana mestinya agar dapat mencapai tujuan dan meminimalisir resiko.

Penelitian kelima yang dilakukan oleh Mohammad Dienul Haq, Sukidin, Pudjo Suharso. 2023 dengan judul “Evaluasi Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) di MtsN 5 Jember Tahun 2021”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif . Teori yang diambil adalah teori evaluasi

program dengan tokoh yang berbeda . Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada teori dan lokus penelitian. Kontribusi dari penelitian terdahulu adalah suatu program PIP apabila dijalankan dengan sesuai dan mendapat dukungan oleh berbagai sumber daya maka akan dapat mencapai tujuan, hal ini terbukti dengan berkurangnya angka putus sekolah dan tingginya angka melanjutkan pendidikan.

Penelitian keenam yang dilakukan oleh Abd. Rohim Asnawi, Bambang Budi Wiyono, Asep Sunandar. 2021 dengan judul “Evaluasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di Indonesia Hasil Pendidikan”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif . Teori yang diambil adalah teori evaluasi program. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada lokus dan konteks teori evaluasi. Kontribusi dari penelitian terdahulu disesuaikan dengan hasil penelitian bahwa lamanya berkas persyaratan dan besaran biaya bantuan yang kecil belum bisa mengatasi masalah pendidikan, namun pada program KIP Kuliah bantuan biaya pendidikan disesuaikan dengan sistem *cluster* daerah sehingga diharapkan dapat memberikan dampak untuk pendidikan.

Penelitian ketujuh yang dilakukan oleh Wirasto Tri A., Sri Suwitri, Margaretha S., Dyah Hariani / 2023 dengan judul “Evaluasi dampak pelaksanaan kebijakan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kecamatan Banjarsari, Surakarta berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 Pasal 29”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian lembaga terkait dan masyarakat yang terdampak secara langsung. Pada penelitian ini menggunakan teori pelaksanaan dan evaluasi dampak oleh Finsterbusch and Motz. Persamaan

penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada teori evaluasi dampak yang digunakan dari tokoh yang sama, sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada topik permasalahan dan lokus penelitian. Penelitian ini menunjukkan bahwa adanya program RTH belum sepenuhnya berdampak pada segala aspek, dampak yang bisa dirasakan secara langsung adalah pada ekonomi dan lingkungan.

Penelitian kedelapan yang dilakukan oleh Pandu Pratomo, Sri Suwitri, Ari Subowo / 2023 dengan judul “Analisis dampak kebijakan penerimaan peserta didik SMP 3 Semarang terkait seleksi nilai prestasi dengan metode uji prestasi dan surat pernyataan”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian lembaga terkait dan siswa atau masyarakat. Pada penelitian ini menggunakan teori kebijakan publik, analisis kebijakan dan teori dampak kebijakan dari Thomas dye , Langbein Weiss dan Finterbusch and motz.. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada teori evaluasi dampak yang digunakan dari tokoh Finterbusch and motz, sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada topik permasalahan dan lokus penelitian. Penelitian ini menunjukkan bahwa adanya kebijakan seleksi prestasi akan mengurangi praktik kecurangan dalam proses seleksi masuk sekolah.

Penelitian kesembilan yang dilakukan oleh Alifiyah Rahma (2024) yang berjudul “Evaluasi Dampak Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak terhadap Pemenuhan Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif di Kota Depok. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Pada penelitian ini menggunakan teori Evaluasi Dampak Kebijakan Finterbush and Motz (1993). Perbedaan penelitian ini

terletak pada topik permasalahan dan lokus penelitian. Kontribusi penelitian ini menekankan pada untuk setiap unit pendampak dilakukan analisis

Penelitian kesepuluh yang dilakukan oleh Byantoro Adjie (2024) dengan judul *“The Impact of Scholarships on Student Achievement A Mix Methods”*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Mix Metod. Perbedaan penelitian ini terletak pada lokus penelitian. Kontribusi penelitian ini yaitu bahwa program beasiswa dapat memberikan motivasi dan semangat belajar mahasiswa, pemanfaatan bantuan yang sesuai, dan pentingnya pemberian bimbingan konseling atau akademik yang terstruktur pada penerima beasiswa untuk menjaga akademik mereka.

Berdasarkan penelitian terdahulu pada Tabel 1.6.1 dapat diidentifikasi bahwa evaluasi dampak sangat penting dilaksanakan untuk mengetahui dampak suatu kebijakan atau program. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu terletak pada lokus dan fokus peneliti yang akan membahas mengenai dampak dari KIP Kuliah meliputi dampak individu, organisasi, ekonomi, dan masyarakat Sedangkan persamaan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teori evaluasi dampak oleh Finterbusch and motz . Selain itu, persamaan didapat dari objek penelitian yang mana masalah pendidikan menjadi masalah yang penting dalam pembangunan berkelanjutan.

### **1.6.2 Administrasi Publik**

Secara etimologis, administrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata “ad” dan “ministrate,” yang berarti “to serve” atau melayani. Menurut S.P. Siagian (2004:2), administrasi didefinisikan sebagai proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan pada rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga secara sederhana administrasi dapat diartikan sebagai kegiatan melayani, memimpin, mengatur atau mengelola dan mengurus suatu usaha

Publik berarti umum, negara, dan masyarakat atau orang banyak. Menurut Jefkins (dalam Abdussamad, 2021), publik adalah sekelompok orang yang berinteraksi dengan suatu organisasi, baik di dalam (internal) maupun di luar (eksternal) organisasi tersebut.

Definisi Administrasi Publik yang dikemukakan oleh Chandler dan Plano (dalam Keban, 2014:3), merupakan proses di mana sumberdaya dan anggota organisasi dikoordinir dan dikelola dengan baik untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan menjalankan keputusan atau kebijakan publik. Sementara Menurut Nicholas Henry (1988), administrasi publik adalah kombinasi kompleks antara teori dan praktik yang bertujuan untuk memahami hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial.

Administrasi publik merupakan perpaduan antara seni dan ilmu dalam mengelola urusan publik serta melaksanakan tugas yang telah ditetapkan. Berdasarkan pandangan para ahli, administrasi publik dapat dipahami sebagai

proses yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya, dengan tujuan menyelesaikan permasalahan masyarakat yang semakin kompleks.

Administrasi publik tidak terlepas dari paradigma yang mendasari perkembangannya. Paradigma administrasi publik menjadi landasan dalam memahami bagaimana administrasi publik dijalankan, berkembang, dan beradaptasi dengan perubahan zaman.

### **1.6.3 Paradigma Administrasi Publik**

Paradigma merupakan suatu cara memandang, nilai-nilai, metode-metode, suatu prinsip dasar, atau cara dalam memecahkan suatu permasalahan, yang dipedomani oleh suatu negara pada periode tertentu (Keban,2014). Nicholas Henri Menyajikan 5 paradigma administrasi publik, namun dalam edisi revisi bukunya yang ke-13 pada tahun 2018 menjelaskan bahwa telah muncul paradigma baru dalam administrasi publik yakni *paradigma of public administration as governance* (1990). Adapun ke enam paradigma tersebut antara lain:

Paradigma 1 (1900-1926) "The Politics-Administration Dichotomy," menekankan pemisahan antara politik dan administrasi pemerintahan sebagai strategi untuk meningkatkan efisiensi serta efektivitas dalam administrasi publik dan tata kelola kolaboratif (*Collaborative Governance*).

Paradigma 2 (1927-1937) "Prinsip-Prinsip Administrasi," diperkenalkan oleh tokoh seperti Willoughby, Gullick, dan Urwick, yang menekankan pentingnya prinsip-prinsip administratif sebagai fokus utama dalam administrasi publik.

Prinsip-prinsip ini dirumuskan dalam konsep POSDCORB, yang mencakup (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting* dan *Budgeting*). Lokus administrasi publik sangat luas dan berlaku dimana saja atau bersifat universal.

Paradigma ketiga (1950-1970), "Public Administration as Political Science," menggambarkan administrasi publik sebagai bagian dari ilmu politik. Paradigma ini muncul sebagai upaya untuk membangun kembali hubungan konseptual antara administrasi dan ilmu politik. Perubahan serta pembaruan dalam bidang administrasi pada masa itu menyebabkan administrasi publik kembali ke induk keilmuannya, yaitu ilmu politik.

Paradigma keempat, "Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi" (1956–1970), berkembang dalam dua arah utama. Pertama, administrasi publik berkembang menjadi ilmu yang lebih mandiri, didukung oleh disiplin psikologi sosial. Kedua, paradigma ini mulai berfokus pada kebijakan publik karena dapat diterapkan dalam berbagai konteks administrasi publik. Meskipun demikian, paradigma ini mengurangi batasan atau locus administrasi.

Paradigma 5 (1970–sekarang) "Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik. Paradigma ini memiliki fokus dalam teori organisasi, manajemen, dan kebijakan publik, dan lokusnya adalah masalah dan *public interest*.

Paradigma Governance 6 (1990–sekarang) membahas perkembangan pemerintahan ke arah pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintahan yang baik mencapai kepuasan publik dengan memberikan pelayanan yang baik dan

melibatkan berbagai pihak kepentingan. Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat adalah pilar paradigma *Good Governance*, yang digambarkan dalam Teori dan Aplikasi Good Governance.

Penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis ini termasuk dalam paradigma ke-6 yaitu paradigma *governance*. Paradigma *governance* memfokuskan pada tujuan negara untuk memberikan pelayanan yang baik dan layak kepada publik untuk mendapatkan kepuasan dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Paradigma *governance* ini menitik beratkan pada arah pemerintahan yang lebih baik (*good governance*) dengan pemberian pelayanan publik yang baik serta peningkatan kinerja para petugas guna mencapai kepuasan masyarakat sebagai penerima pelayanan publik.

Paradigma administrasi publik dan kebijakan publik saling berkaitan karena paradigma administrasi publik menentukan bagaimana kebijakan publik dirancang, diimplementasikan, dan dievaluasi. Perubahan dalam paradigma administrasi publik, seperti pergeseran dari model birokrasi tradisional ke *governance* yang lebih partisipatif, turut mempengaruhi proses kebijakan publik. Paradigma administrasi publik menjadi landasan dalam menentukan pendekatan dan mekanisme yang digunakan dalam penyusunan serta pelaksanaan kebijakan publik untuk mencapai tujuan yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

#### 1.6.4 Kebijakan Publik

##### A. Definisi Kebijakan Publik

Kebijakan adalah hasil dari analisis mendalam terhadap berbagai alternatif yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu dan berakhir pada pemilihan keputusan yang terbaik. Beberapa alternatif yang ada dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu (Pasolong, 2012). Pada dasarnya, kebijakan publik adalah keputusan pemerintah dengan tujuan mengatur kehidupan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara memilih suatu tindakan apapun guna menciptakan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat luas.

Dari kamus Administrasi Publik, (Chandler dan Plano (1988:107) dalam Pradipta et al., 2015) secara konsep mendefinisikan Kebijakan publik digunakan secara strategis sebagai sumber daya yang tersedia untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh pemerintah atau masyarakat umum. Chandler dan Plano juga berpendapat bahwa kebijakan publik menjadi investasi yang berkelanjutan oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang lemah ditengah masyarakat agar mereka dapat hidup dan berpartisipasi dalam pemerintahan.

Kebijakan publik adalah *whatever government choose to do or not to do*. (Thomas R Dye, 2008), Artinya adalah bahwa apapun kegiatan yang dilakukan pemerintah merupakan kebijakan. Interpretasi kebijakan disini memiliki dua makna. Pertama, bahwa kebijakan merupakan tindakan yang harus dilakukan oleh badan pemerintah, kedua, kebijakan tersebut

mengandung pilihan apakah dapat dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.

Riant Nugroho (2013:8) mengemukakan kebijakan publik merupakan keputusan politik yang dibentuk oleh lembaga publik yaitu lembaga yang keberlangsungannya dibiayai oleh uang publik yang didapat melalui publik melalui pemungutan seperti pajak, retribusi, dan lainnya yang telah diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan pendapat beberapa tokoh, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu tindakan atau keputusan yang dilakukan pemerintah dalam rangka mengatasi masalah publik guna mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat luas.

Kebijakan publik dibuat tidak begitu saja, melainkan harus melalui berbagai proses ataupun tahapan yang panjang. Kebijakan publik dan proses kebijakan publik memiliki hubungan erat, di mana kebijakan publik dihasilkan melalui serangkaian tahapan dalam proses kebijakan. Setiap kebijakan yang diterapkan harus melewati proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi agar dapat berjalan efektif serta memberikan dampak yang diharapkan bagi masyarakat.

## **B. Proses Kebijakan Publik**

Suharno (2013) memaknai proses kebijakan sebagai sebuah rangkaian dari aktivitas intelektual yang dilakukan dalam kerangka kegiatan yang sifatnya politis. Konteks kebijakan publik sendiri sangat luas karena tidak hanya menyangkut satu bidang, baik dari ekonomi, kesehatan,

pendidikan, budaya, dan sebagainya, serta dilihat dari hirarkinya dari kebijakan publik bersifat lokal hingga nasional (Subarsono, 2021:9). Menurut William N Dunn dalam (Subarsono, 2021:9) tahapan atau proses pembuatan kebijakan publik sebagai berikut :

1. Tahap Penyusunan Agenda Kebijakan

Penyusunan agenda kebijakan merupakan tahapan dimana legislator memilah dan memilih masalah publik yang menjadi prioritas untuk segera diatasi dengan membuat kebijakan publik yang tepat.

2. Tahap Formulasi Kebijakan

Formulasi kebijakan merupakan tahapan dimana masalah publik akan di bahas, di uji, di kaji, dan dianalisis secara mendalam untuk selanjutnya diambil alternatif terbaik guna mengatasi masalah publik.

3. Tahap Adopsi Kebijakan

Adopsi kebijakan merupakan tahapan dimana alternatif terbaik diambil menjadi kebijakan publik yang mana sebelumnya sudah disepakati bersama *policy maker*.

4. Tahap Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan yang telah dirumuskan untuk memastikan pelaksanaan kebijakan dijalankan dengan benar.

5. Tahap Penilaian Kebijakan atau Evaluasi

Evaluasi merupakan tahapan dimana dilakukan penilaian atas kebijakan yang ditetapkan untuk memastikan bagaimana kebijakan telah dijalankan sesuai prosedur dan apakah memiliki dampak terhadap penyelesaian masalah publik.

Dalam penelitian ini, penulis melaksanakan pada tahap evaluasi. Evaluasi yang dilakukan yaitu evaluasi dampak program atau kebijakan. Dampak merupakan bagian dari evaluasi yang fokusnya adalah pada perubahan yang terjadi akibat dari pelaksanaan program kebijakan

#### **1.6.5 Evaluasi Kebijakan**

##### **A. Definisi Evaluasi**

Secara manajerial, evaluasi adalah proses yang bertujuan untuk menilai atau membandingkan pencapaian suatu kegiatan atau program secara objektif berdasarkan apa yang telah ditentukan sebelumnya. (Abdoellah dan Yudi Rusfiana, 2016). Menurut Subarsono (2021:119), evaluasi merupakan suatu aktivitas menilai kinerja dari sebuah kebijakan. Evaluasi adalah proses mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi untuk menilai suatu objek berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek tersebut (Munthe, 2015).

Winarno (2012:234) menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan publik merupakan upaya untuk mengetahui bagaimana kebijakan berdampak pada situasi kehidupan nyata. Sementara itu, menurut Lester dan Stewart dalam Agustino (2008:185), evaluasi ditujukan untuk mengevaluasi sebagian dari

kegagalan suatu kebijakan dan untuk menentukan apakah kebijakan yang telah dibuat dan diterapkan dapat memiliki dampak yang diinginkan.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan adalah kegiatan melihat, dan memastikan suatu kebijakan telah diimplementasikan dengan baik sesuai dengan ketentuan guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Evaluasi program atau kebijakan memiliki beberapa tujuan, menurut Subarsono (2021: 120-122) tujuan evaluasi sebagai berikut :

- 1) Mengetahui tingkat kinerja kebijakan. Memiliki maksud memberikan gambaran seberapa baik tujuan program atau kebijakan telah tercapai.
- 2) Mengetahui efisiensi dari kebijakan. Dapat mengetahui manfaat dan biaya dari program atau kebijakan yang dilaksanakan.
- 3) Menilai tingkat keluaran atau *policy outcome*, melalui tahap ini (penilaian) kita mengetahui seberapa besar dan seberapa baik kualitas dari pengeluaran kebijakan.
- 4) Mengetahui *impact* dari kebijakan, apakah kebijakan tersebut memberikan dampak yang baik atau buruk bagi sasaran.
- 5) Untuk mengetahui penyimpangan dari suatu kebijakan atau program yang kemungkinan bisa terjadi, hal tersebut dapat dilakukan melalui cara mencocokkan sasaran/tujuan dengan apa yang sudah (target) dicapai.

- 6) Untuk dijadikan pertimbangan agar kebijakan selanjutnya dapat lebih baik.

Berdasarkan tujuan evaluasi menurut Subarsono, penelitian yang dilakukan peneliti terkait dengan evaluasi dampak untuk mengetahui dampak suatu program. Pada kajian ini yaitu untuk mengetahui sampaimana dampak program KIP Kuliah telah tercapai sesuai dengan tujuan dan perubahan kelompok sasaran.

Evaluasi kebijakan dan model evaluasi saling berkaitan karena model evaluasi digunakan sebagai kerangka kerja dalam evaluasi kebijakan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan dampak suatu kebijakan. Dengan menggunakan model evaluasi yang tepat, hasil evaluasi dapat memberikan gambaran yang lebih sistematis dan objektif mengenai keberhasilan atau kekurangan suatu kebijakan, sehingga dapat dijadikan dasar untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang.

## **B. Model Evaluasi**

Terdapat beberapa model-model yang digunakan untuk mengevaluasi suatu program atau kebijakan, berikut merupakan model-model evaluasi yang dikemukakan oleh beberapa ahli :

- a. Evaluasi menurut William N Dunn

Model evaluasi ini dikemukakan oleh William N. Dunn dan dijelaskan dalam buku yang ditulis oleh Nugroho (2009). Dunn

mengidentifikasi enam kriteria untuk mengevaluasi suatu program, yaitu:

1. Efektivitas, mengukur sejauh mana kebijakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, biasanya dinilai dari hasil yang diperoleh atau manfaat ekonominya.
2. Efisiensi, memanfaatkan sumber daya secara optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan usaha yang sekecil mungkin.
3. Kecukupan, menilai apakah kebijakan dapat memenuhi kebutuhan atau tujuan yang menjadi dasar perumusannya.
4. Kesamaan, berkaitan dengan keadilan dalam distribusi manfaat dan beban kebijakan di antara berbagai kelompok masyarakat.
5. Responsivitas, Mengukur seberapa efektif suatu kebijakan dalam memenuhi kebutuhan serta aspirasi kelompok masyarakat tertentu.
6. Ketepatan, menilai relevansi tujuan kebijakan serta kekuatan asumsi yang mendasarinya dalam mencapai hasil yang diharapkan.

b. Evaluasi *Countenance Evaluation Model* menurut Stake

Countenance Evaluation Model, yang dikembangkan oleh Stake (Mardiah & Syarifudin, 2019), menekankan dua aspek utama dalam evaluasi, yaitu deskripsi (*description*) dan pertimbangan (*judgments*). Evaluasi dilakukan dalam tiga tahapan: **anteseden**

(kondisi awal), **transaksi** (proses pelaksanaan), dan **keluaran** (hasil program). Deskripsi mencakup tujuan yang direncanakan (*goals*) dan hasil yang terjadi (*effects*), sedangkan pertimbangan melibatkan standar dan penilaian berdasarkan perbandingan dengan program lain. Model ini bertujuan untuk menilai efektivitas suatu program dengan membandingkannya dengan standar yang telah ditetapkan.

c. Evaluasi Formatif dan Sumatif

Evaluasi formatif dan sumatif adalah model evaluasi yang saling berkaitan yaitu evaluasi terhadap perbaikan program yang sedang berjalan dan evaluasi untuk melihat hasil dari program yang dijalankan. Evaluasi formatif merupakan evaluasi yang dilakukan ketika program masih berlangsung. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai kualitas pelaksanaan program serta konteks organisasi, termasuk aspek-aspek seperti personil, prosedur kerja, dan sumber daya yang digunakan (Sugiyono, 2013:749). Tujuan dari evaluasi formatif ini adalah untuk mendapatkan umpan balik, atau feedback, yang akan membantu memperbaiki aktivitas program.

Evaluasi sumatif memiliki fokus pada penyediaan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan terkait adopsi, keberlanjutan, atau pengembangan suatu program. Menurut Sugiyono (2013), evaluasi ini menekankan pada efektivitas pencapaian program, terutama dalam menghasilkan suatu produk atau keluaran tertentu.

Perbedaan utama antara evaluasi formatif dan sumatif terletak pada fungsinya. Evaluasi formatif berperan dalam membantu pengembangan program atau objek selama proses berlangsung, sedangkan evaluasi sumatif bertujuan untuk menilai nilai atau efektivitas suatu objek setelah dikembangkan (Stufflebeam & Coryn, 2014: 345).

d. Evaluasi CIPP menurut Stufflebeam

Menurut Madaus , Scriven, Stufflebeam (1993:118), tujuan penting dari evaluasi adalah untuk memperbaiki suatu program. Evaluasi CIPP merupakan gabungan antara model evaluasi formatif dan sumatif yang mana CIPP tidak hanya melakukan penilaian pada proses berjalanya program melainkan juga pengukuran terhadap kinerja atau hasil-hasil yang didapatkan. Evaluasi model Stufflebeam terdiri dari empat dimensi yang biasa disebut dengan CIPP, yaitu : *context, input, process, dan output* yang mampu menggambarkan evaluasi program kebijakan baik secara formatif maupun sumatif.

e. Evaluasi menurut Finsterbusch dan Motz (1994)

1. *Single Progame After Only*, yaitu evaluasi yang dilakukan setelah program dilaksanakan untuk mengetahui dampak dari program terhadap kelompok sasaran

2. *Single Programme Before After*, yaitu evaluasi yang dilakukan sebelum dan sesudah program dilaksanakan untuk mengetahui dampak dari program terhadap kelompok sasaran
3. *Comparative After Only*, yaitu perbandingan dua kelompok sesudah dilaksanakannya program untuk mengetahui dampak program terhadap kelompok sasaran dan kelompok kontrol
4. *Comparative Before After*, yaitu perbandingan dua kelompok sebelum dan sesudah dilaksanakannya program untuk mengetahui dampak program terhadap kelompok sasaran dan kelompok kontrol

**Tabel 1. 4 Metode untuk Evaluasi Dampak Program**

| Jenis Evaluasi                       | Pengukuran Kondisi |         | Kelompok Kontrol | Informasi yang diperoleh                            |
|--------------------------------------|--------------------|---------|------------------|-----------------------------------------------------|
|                                      | Sebelum            | Sesudah |                  |                                                     |
| <i>Single program after only</i>     | Tidak              | Ya      | Tidak ada        | Keadaan kelompok sasaran                            |
| <i>Single program before - after</i> | Ya                 | Ya      | Tidak ada        | Perubahan sebelum dan sesudah pada kelompok sasaran |
| <i>Comparative after only</i>        | Tidak              | Ya      | Ada              | Keadaan kelompok sasaran dan kelompok kontrol       |

|                                       |    |    |     |                                                                               |
|---------------------------------------|----|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Comparative<br/>before - after</i> | Ya | Ya | Ada | Efek<br>program<br>terhadap<br>kelompok<br>sasaran dan<br>kelompok<br>kontrol |
|---------------------------------------|----|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------|

*Sumber : Finterbusch dan Motz dalam Wibawa 1994*

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model Evaluasi Dampak menurut Finsterbusch dan Motz yaitu *Single Programe After Only* untuk mengetahui dampak program KIP Kuliah bagi kelanjutan pendidikan di Universitas Diponegoro sesudah program dilaksanakan.

Dalam studi evaluasi kebijakan, evaluasi memiliki berbagai macam model yang dapat digunakan, hal ini tentunya disesuaikan kembali dengan kebutuhan evaluasi. Evaluasi dilaksanakan dengan tujuan mengetahui bagaimana program atau kebijakan dirancang, diimplementasikan, sampai dengan bagaimana dampak yang ditimbulkan dari kebijakan ini. Sehingga sangat penting untuk melakukan evaluasi dampak guna mengetahui apakah dampak yang muncul sudah sesuai yang diharapkan atau tidak.

### **1.6.6 Evaluasi Dampak**

#### **A. Definisi Evaluasi Dampak**

Menurut Soemarwoto (1994: 54) dampak merupakan peralihan yang terjadi sebagai akibat terjadinya suatu kegiatan tertentu yang dapat bersifat positif atau negatif. Sedangkan menurut Irawan dalam Sari (2015: 29) mendefinisikan dampak sebagai perubahan fisik maupun sosial yang diakibatkan oleh hasil suatu kebijakan. Dampak intervensi program

ditentukan oleh pengaruhnya terhadap kelompok sasaran, baik dampak yang diantisipasi maupun yang tidak terduga, serta sejauh mana dampak tersebut dapat mengubah pola perilaku kelompok tersebut. Di sisi lain, hasil dari intervensi program mempengaruhi kelompok sasaran, terlepas dari apakah hasil tersebut sesuai dengan ekspektasi atau tidak, dan apakah hasil tersebut dapat memicu perubahan perilaku baru pada kelompok target.

Dalam kebijakan, terdapat dua jenis hasil yang dihasilkan, yaitu keluaran (*output*) dan dampak (*impact*). Keluaran kebijakan mencakup berbagai bentuk barang, layanan, atau sumber daya yang disalurkan kepada pihak yang menjadi sasaran atau penerima manfaat, sementara dampak kebijakan adalah perubahan dalam perilaku atau sikap yang disebabkan oleh keluaran tersebut.

Output adalah keluaran langsung dari kegiatan sebuah program, sedangkan outcome merupakan manfaat yang dirasakan oleh kelompok sasaran selama atau setelah keterlibatan mereka dalam program. Dampak (*impact*) mencakup efek jangka panjang dari manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran, yang dapat memengaruhi pengetahuan, keahlian, perilaku, sikap, nilai, kondisi, atau status mereka. Dampak ini merupakan konsekuensi lebih luas bagi masyarakat akibat dari implementasi kebijakan tersebut.

Samodra Wibawa (1994) menjelaskan, evaluasi dampak kebijakan merupakan kegiatan memberikan penilaian dan perhatian yang lebih besar kepada output dan dampak kebijakan dibandingkan proses pelaksanaannya.

Menurut Palumbo dalam Parson (2008: 552) evaluasi dampak digunakan untuk memahami dan mengetahui apakah program atau kebijakan telah memberikan pengaruh terhadap permasalahan yang dihadapi.

Pendapat lain menurut Rossi dan Freeman dalam Parson (2008: 604) mengungkapkan bahwa penilaian atas dampak berfungsi untuk mengetahui apakah intervensi tersebut memberikan efek yang diinginkan atau tidak. Sedangkan Menurut Widodo (2018:120), riset evaluasi dampak (*impact evaluation*) berfokus pada sejauh mana suatu kebijakan mampu menghasilkan perubahan yang diharapkan (*intended impacts*). Tujuan dari riset ini adalah untuk menguji efektivitas kebijakan atau proyek dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi dampak merupakan kegiatan mengamati dan menilai suatu program atau kebijakan apakah sudah memberikan perubahan yang sesuai dengan tujuan atau tidak.

## **B. Dimensi Evaluasi Dampak Menurut Para Ahli**

### **1) Evaluasi Dampak menurut Anderson**

Menurut Anderson dalam Irfan Islamy (1984:115), dampak kebijakan memiliki beberapa dimensi sebagai berikut :

- a. Dampak pada masalah publik pada kelompok sasaran baik yang diharapkan atau tidak
- b. Dampak terhadap kelompok diluar sasaran
- c. Dampak sekarang dan dampak yang akan datang

d. Dampak biaya langsung dan tidak langsung

2) Evaluasi Dampak menurut Langbein

Menurut Langbein dalam Wibawa, dimensi dampak sebagai berikut:

a. Waktu

Pada dimensi ini menjelaskan keterkaitan kebijakan memberikan dampak sekarang atau yang akan datang

b. Selisih dampak aktual dengan yang diharapkan

Perbedaan antara dampak yang terjadi sebenarnya dengan dampak yang diinginkan. Hal ini mencakup identifikasi apakah dampak yang terjadi sudah sesuai atau justru bertolak belakang dengan yang diharapkan.

c. Tingkat agregasi dampak

Dampak yang dirasakan seseorang dapat mempengaruhi perubahan masyarakat secara keseluruhan.

d. Tipe dampak

Tipe dampak mencakup dampak pada kehidupan ekonomi, proses pembuatan kebijakan, dan kualitas hidup individu, dan masyarakat

3) Evaluasi Dampak menurut Wayne Parsons (2001)

**Tujuan Evaluasi Dampak**

Parsons, W. (2001). Evaluasi sumatif atau dampak adalah proses penilaian yang dilakukan setelah suatu kebijakan diimplementasikan untuk menilai dampaknya. Tujuan utamanya

adalah mengukur sejauh mana program atau kebijakan tersebut efektif dalam memberikan pengaruh nyata terhadap masalah yang ingin diselesaikan. Adapun penjabaran tujuan evaluasi dampak lebih lanjut sebagai berikut :

- a. Menilai apakah program telah membawa dampak yang sesuai harapan individu, rumah tangga dan lembaga.
  - b. Menilai apakah dampak tersebut memiliki keterkaitan dengan intervensi program
  - c. Mengeksplorasi apakah ada akibat yang tidak diperkirakan baik yang positif maupun yang negatif
  - d. Menganalisis bagaimana program mempengaruhi kelompok sasaran, dan apakah perbaikan kondisi kelompok sasaran dikarenakan oleh program tersebut faktor lain.
- 4) Evaluasi Dampak menurut Finterbush and Motz (1993)

Unit-unit Sosial Pendampak :

Pada dasarnya, setiap program atau kebijakan didesain untuk memecahkan suatu masalah, dimana pasti terdapat unit yang terdampak atas suatu program atau kebijakan tersebut. Finterbusch dan Motz dalam Samodra Wibawa (1994:53-60) menetapkan unit-unit sosial yang terdampak atas program atau kebijakan sebagai berikut :

### 1. Dampak Individu

Program atau kebijakan tentunya memiliki dampak pada setiap pihak. Salah satu pihak yang pertama kali terkena dampak suatu program atau kebijakan adalah individu. Pada dampak individu terdapat lima aspek penting yang berpengaruh yaitu, biologis (berkaitan pada kesehatan individu), psikologis (bergantung pada kesenangan atau tingkat stress masyarakat terhadap pelaksanaan program kebijakan), personal dan soaial (berkaitan dengan motivasi, dan bertambah/kurangnya kegiatan organisasi), ekonomi (bergantung pada tingkat kesejahteraan), dan lingkungan (bergantung pada kesempatan warga mempertahankan lingkungan)

### 2. Dampak Organisasi

Dampak organisasi dimaksudkan sebagai pengaruh dari kebijakan pemerintah dalam mencapai tujuan yang selaras dengan visi dan misi organisasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta menentukan apakah program tersebut memberikan manfaat atau kerugian bagi organisasi.

### 3. Dampak Lembaga dan Sistem Sosial

Lembaga atau sistem sosial merupakan salah satu pihak yang terdampak oleh suatu program kebijakan. Hal ini terlihat dari adanya hubungan yang terbentuk antara lembaga dan sistem sosial dengan organisasi pelaksana. Di sisi lain, penting juga

untuk memahami pandangan lembaga sosial kemasyarakatan terhadap program kebijakan pemerintah.

#### 4. Dampak Masyarakat

Masyarakat merupakan pihak yang paling berhubungan dengan pelaksanaan program kebijakan, karena mereka adalah pihak terdekat yang langsung berinteraksi dengan implementasi kebijakan tersebut. Dampak kebijakan pada masyarakat melihat sejauh mana kebijakan ini mempengaruhi kapasitas masyarakat. Dampak pada masyarakat mencakup empat aspek utama, yaitu lingkungan hidup, kondisi ekonomi, pendidikan dan keagamaan, serta sosial budaya.

Samodra Wibawa (1994) dalam Analisis Dampak Sosial (ADS) menyatakan bahwa ada dua hal yang perlu dianalisis. Pertama, unit pendampak yaitu kelompok atau entitas sosial yang terkena dampak, seperti individu, organisasi, dan lembaga sosial. Kedua, aspek dampak yaitu bidang kehidupan yang terpengaruh, yang meliputi ekonomi, politik, sosial, budaya, lingkungan, dan fisik.

Stynes (Disbudpar Banten, 2013:20) menjelaskan bahwa dampak ekonomi dikelompokkan dalam tiga indikator yaitu (1) *direct effect* (dampak langsung), mencakup efek langsung pada penjualan, penciptaan lapangan kerja, pendapatan pajak, dan peningkatan pendapatan masyarakat akibat aktivitas ekonomi tertentu. (2) *indirect effect* (dampak tidak langsung), mencakup efek tidak langsung pada perubahan tingkat harga, perubahan

mutu dan jumlah barang dan jasa, perubahan dalam penyediaan properti dan variasi pajak, serta perubahan sosial dan lingkungan *dan (3) induced effect*.

**Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program :**

Edward A. Suchman dalam bukunya yang berjudul *Evaluative Research: Principles and Practice in Public Service & Social Action Programs* (1967) menjelaskan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan program yang berdampak, yaitu :

1. Sistem Monitoring

Sistem monitoring menurut Purba (2005) dalam Listya (2010) adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memastikan suatu program atau kebijakan berlangsung sesuai dengan rencana yang telah direncanakan sebelumnya.

2. Sumber Daya Pendukung

Menurut Wulandari (2013), sumber daya pendukung mencakup segala bentuk fasilitas, tenaga, dan sarana yang berperan penting dalam keberhasilan suatu program.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori evaluasi dampak menurut Finterbush and Motz (1993) dalam Wibawa (1994), karena memiliki cara yang komprehensif dan memiliki bahasan yang mendalam pada semua dampak. Selanjutnya dalam penelitian evaluasi dampak program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah di Undip, peneliti menggunakan aspek dampak individu, organisasi, masyarakat, dan ekonomi

dari teori evaluasi dampak Finterbusch dan Motz dalam Samodra Wibawa (1994). Faktor yang digunakan dalam evaluasi ini yaitu faktor keberhasilan program dari Edward A. Suchman (1967) yaitu, sistem monitoring dan sumber daya pendukung.

#### **1.6.7 Program KIP Kuliah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pemerintah diwajibkan menyediakan pendidikan tinggi yang berkualitas, terjangkau, dan merata guna mendukung kemajuan masyarakat, meningkatkan kemandirian, dan mendorong kesejahteraan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memperluas akses pendidikan tinggi dan peluang belajar, serta membentuk sumber daya manusia yang cerdas dan kompetitif agar mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan bangsa.

Pada tahun 2020, Program Indonesia Pintar (PIP) yang sebelumnya hanya tersedia untuk siswa SD dan SMP, kini juga tersedia untuk siswa dengan nama Kartu Indonesia Pintar (KIP Kuliah). Dalam konteks pendidikan tinggi KIP merupakan perpanjangan atau transformasi dari program Bidikmisi yang telah dilaksanakan sebelumnya. Kebijakan ini diterapkan di seluruh perguruan tinggi di Indonesia, baik perguruan tinggi negeri (PTN) maupun swasta (PTS).

Melalui PIP tahun 2020, pemerintah memberikan dukungan pendidikan bagi mahasiswa berupa Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau (KIP Kuliah). Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) adalah program beasiswa dari pemerintah yang ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia melanjutkan pendidikan tinggi. Beasiswa ini diperuntukan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu,

sebagaimana diatur dalam Permendikbud No. 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (PIP). KIP Kuliah bertujuan untuk menjamin keberlanjutan studi mahasiswa dengan memberikan bantuan biaya kuliah serta dukungan biaya hidup bulanan bagi mereka yang memenuhi kriteria ekonomi dan akademik.

#### **Tujuan Program KIP Kuliah :**

Berdasarkan Persesjen KemendikbudRistek Nomor 13 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan Program Indonesia Pintar (KIP) di Pendidikan Tinggi, PIP di pendidikan tinggi bertujuan untuk membantu biaya hidup, biaya pendidikan, dan biaya pengelolaan dalam rangka :

1. Meningkatkan perluasan akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi bagi Mahasiswa WNI yang tidak mampu secara ekonomi.
2. Meningkatkan prestasi Mahasiswa pada bidang akademik dan non akademik
3. Menjamin keberlangsungan studi Mahasiswa yang berasal dari daerah 3T
4. Meningkatkan angka partisipasi kasar Pendidikan Tinggi.

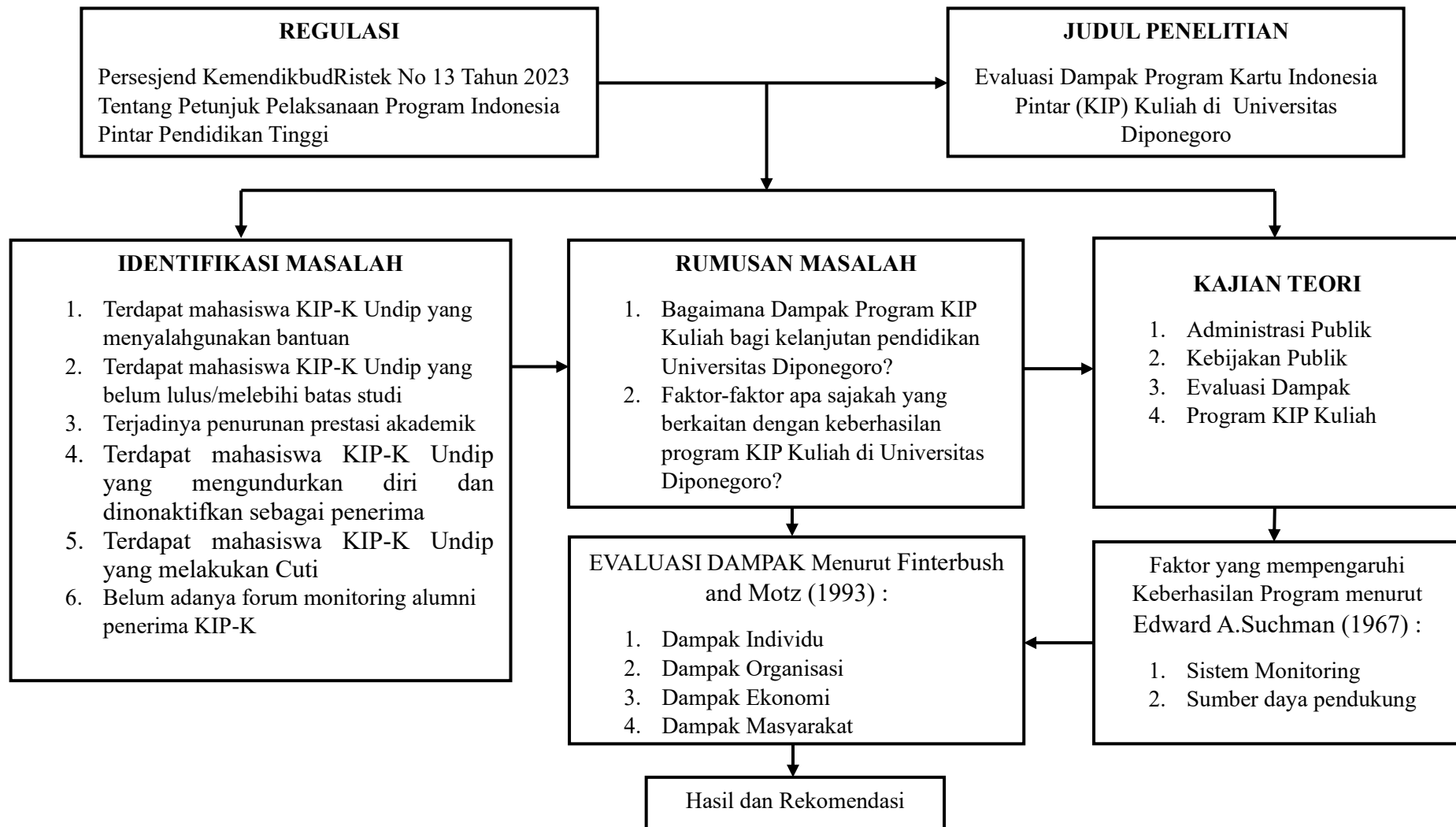
#### **Penerima KIP di Pendidikan Tinggi :**

Berdasarkan Persesjen KemendikbudRistek Nomor 13 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan Program Indonesia Pintar (KIP) di Pendidikan Tinggi, maka dapat dirumuskan penerima program PIP di pendidikan tinggi sebagai berikut :

1. Mahasiswa pemilik KIP Pendidikan Menengah

2. Mahasiswa dari keluarga miskin/rentan miskin atau berasal dari kelompok PKH, KKS, DTKS, Panti sosial
3. Mahasiswa dari daerah 3T
4. Mahasiswa asli Papua sesuai dengan peraturan pemerintah tentang otonomi khusus untuk Provinsi Papua dan Papua Barat
5. Mahasiswa dari anak TKI yang tinggal di wilayah perbatasan NKRI
6. Mahasiswa yang menempuh pendidikan tinggi di dalam maupun luar negeri yang terdampak bencana alam, konflik sosial, atau situasi tertentu berdasarkan pertimbangan Menteri

## 1.7 Kerangka Penelitian



## **1.8 Operasionalisasi Konsep**

### **1.8.1 Evaluasi Dampak Program KIP Kuliah di Universitas Diponegoro**

Evaluasi dampak merupakan proses untuk menilai sejauh mana suatu program atau kebijakan berhasil mempengaruhi masalah yang ingin diselesaikan. Evaluasi ini penting dilakukan untuk menilai perubahan yang terjadi, baik fisik maupun sosial, sebagai akibat dari kebijakan tersebut.

Evaluasi dampak yang dimaksud, yaitu untuk memastikan bagaimana program KIP Kuliah di Universitas Diponegoro bisa berdampak sesuai yang diharapkan. Evaluasi Dampak Program KIP Kuliah di Universitas Diponegoro merupakan suatu proses mengkaji program kebijakan yang dilahirkan oleh KemendikbudRistek guna mengidentifikasi dampak program KIP Kuliah, hal ini dapat dilihat berdasarkan analisis dampak program KIP Kuliah di Undip, meliputi:

#### **1. Dampak Individu**

Dampak individu dalam evaluasi dampak Program KIP Kuliah di Undip berfokus pada bagaimana program ini mempengaruhi kehidupan mahasiswa penerima dari berbagai aspek, yaitu biologis/fisik, psikologis, serta sosial dan personal. Adapun aspek yang ditimbulkan dapat diamati sebagai berikut :

- a) Aspek biologis/fisik, diamati melalui kondisi kesehatan mahasiswa penerima KIP Kuliah
- b) Aspek psikologis, diamati melalui perasaan senang ataupun stress yang dialami mahasiswa penerima KIP Kuliah

- c) Aspek personal dan sosial, diamati melalui motivasi belajar, pencapaian prestasi dan partisipasi mahasiswa KIP Kuliah dalam berorganisasi

## 2. Dampak Organisasi

Suatu organisasi atau kelompok berpotensi terkena dampak secara langsung maupun tidak langsung dengan adanya suatu kebijakan. Dampak langsung berupa terbantu maupun terganggunya organisasi mencapai tujuan. Sedangkan dampak tidak langsung seperti adanya motivasi kerja. Dalam hal ini, evaluasi dampak berfokus pada bagaimana Program KIP Kuliah mempengaruhi institusi sebagai penyelenggara pendidikan. Pada implementasi program KIP Kuliah, Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) Undip yang menjadi organisasi terkait. Dampak yang ditimbulkan pada dampak organisasi dapat diamati sebagai berikut :

- a) Dampak langsung, diamati melalui Kesesuaian Visi dan Misi Undip dengan Program KIP Kuliah, dan Beban kerja organisasi
- b) Dampak tidak langsung, diamati melalui Reputasi Universitas dari adanya program KIP Kuliah

## 3. Dampak Ekonomi

Dampak ekonomi dari Program KIP Kuliah melibatkan bagaimana beasiswa ini mempengaruhi kondisi ekonomi mahasiswa penerima dan dampak ekonomi pada universitas secara umum. Pada dampak ekonomi

terdapat dampak langsung dan tidak langsung. Adapun dampak yang ditimbulkan dapat diamati sebagai berikut :

- a) Dampak langsung, diamati melalui kondisi ekonomi mahasiswa penerima KIP Kuliah
- b) Dampak tidak langsung, diamati melalui aktivitas mencari penghasilan tambahan oleh mahasiswa penerima KIP Kuliah

#### 4. Dampak Masyarakat

Dampak masyarakat pada program KIP dapat dilihat melalui pengaruh Program KIP Kuliah pada komunitas sosial dan ekonomi yang lebih luas, termasuk masyarakat di sekitar mahasiswa penerima beasiswa dan dampak pada masyarakat umum. Pada dampak masyarakat mencakup pada 4 aspek utama yaitu, pendidikan, sosial dan budaya, ekonomi dan lingkungan hidup. Adapun dampak yang ditimbulkan pada dampak masyarakat dapat diamati sebagai berikut :

- a) Aspek pendidikan, diamati melalui partisipasi pendidikan tinggi dari masyarakat prasejahtera
- b) Aspek sosial dan budaya, diamati melalui perubahan cara pandang masyarakat mengenai pendidikan tinggi
- c) Aspek ekonomi, diamati melalui perubahan kualitas sumber daya manusia dan derajat perekonomian lulusan KIP Kuliah

Setelah mengidentifikasi indikator evaluasi dampak yang akan menjadi pedoman dalam melaksanakan penelitian, maka selanjutnya peneliti akan

mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dampak program KIP Kuliah yang diamati di lapangan.

1. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi dapat diamati melalui dukungan Universitas dan pengelola dalam melakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi program KIP Kuliah

2. Sumber Daya Pendukung

Sumber Daya yang dimaksudkan disini dapat diamati dengan melihat bagaimana sumber daya pelaksana merespon permasalahan KIP Kuliah, dan komitmen pengelola dalam memberdayakan mahasiswa penerima KIP Kuliah dalam kegiatan yang bisa mendorong pencapaian program KIP Kuliah yang berdampak.

**Tabel 1. 5 Operasionalisasi Konsep**

| <b>Fenomena</b>                    | <b>Sub Fenomena</b>      | <b>Aspek</b>        | <b>Gejala yang diamati</b>                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Evaluasi Dampak Program KIP Kuliah | <b>Dampak Individu</b>   | Personal dan Sosial | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Motivasi belajar dan Keikutsertaan mahasiswa dalam organisasi kampus</li> <li>2. Capaian minimum Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa KIP Kuliah</li> </ol>           |
|                                    |                          | Biologis            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kondisi fisik/kesehatan mahasiswa KIP Kuliah</li> </ol>                                                                                                                    |
|                                    |                          | Psikologis          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perasaan senang dengan adanya program KIP Kuliah</li> <li>2. Derajat pengunduran diri mahasiswa KIP Kuliah</li> <li>3. Stigma sosial terhadap penerima beasiswa</li> </ol> |
|                                    | <b>Dampak Organisasi</b> | Dampak Langsung     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesesuaian program KIP Kuliah dengan Visi dan Misi Undip</li> <li>2. Beban Kerja Universitas (Biro Akademik dan Kemahasiswaan)</li> </ol>                                  |

|  |                          |                       |                                                                                                                                     |
|--|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                          | Dampak Tidak Langsung | 1. Peningkatan Reputasi Universitas                                                                                                 |
|  | <b>Dampak Ekonomi</b>    | Dampak Langsung       | 1. Kondisi ekonomi mahasiswa penerima KIP-K                                                                                         |
|  |                          | Dampak Tidak Langsung | 1. Perbedaan biaya bantuan yang diterima<br>2. Aktivitas mahasiswa dalam mencari penghasilan tambahan                               |
|  | <b>Dampak Masyarakat</b> | Pendidikan            | 1. Partisipasi pendidikan tinggi dari keluarga pra sejahtera<br>2. Respon masyarakat terhadap program KIP Kuliah                    |
|  |                          | Sosial dan Budaya     | 1. Penurunan kesenjangan sosial<br>2. Perubahan cara pandang masyarakat mengenai kuliah                                             |
|  |                          | Ekonomi               | 1. Perubahan kualitas sumber daya manusia (lulusan KIP Kuliah)<br>2. Perubahan kondisi perekonomian masyarakat (lulusan KIP Kuliah) |

| FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN PROGRAM |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistem Monitoring                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dukungan Universitas dalam melakukan Monitoring Program KIP-K</li> <li>2. Kegiatan Evaluasi pelaksanaan program KIP-K</li> </ol>                                                                                                              |
| Sumber Daya Pendukung                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan sumber daya pengelola, fasilitas</li> <li>2. Pemberian program pelatihan/pemberdayaan kepada mahasiswa penerima KIP-K oleh Universitas</li> <li>3. Komitmen pengelola dalam mengatasi berbagai hambatan program KIP-K</li> </ol> |

*Sumber : Analisis Peneliti 2024*

## **1.9 Argumen Penelitian**

Program beasiswa KIP Kuliah dalam penyelenggaraan KIP Kuliah harus bersifat efisien, akuntabel, kepatuhan, dan manfaat. Namun, program KIP Kuliah di Universitas Diponegoro masih terdapat permasalahan seperti terdapat mahasiswa penerima yang belum lulus studi, mengalami kemunduran prestasi akademik maupun non akademik, dan terdapat mahasiswa penerima KIP Kuliah yang melakukan pengunduran diri. Permasalahan tersebut apabila tidak segera ditangani maka akan berdampak besar pada keberhasilan program.

Dalam rangka memperbaiki berbagai permasalahan tersebut, maka harus dilakukan evaluasi. Evaluasi dampak pada penelitian ini mempunyai peranan yang sangat penting untuk mengetahui apakah program sudah memberikan dampak atau perubahan, serta memberi masukan untuk memperbaiki berbagai permasalahan yang ada sekaligus sebagai sarana strategi mencapai tujuan program KIP Kuliah di Universitas Diponegoro. Telah terdapat beberapa penelitian evaluasi program, namun belum ada penelitian yang membahas mengenai dampak program KIP Kuliah, sehingga penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menggambarkan dampak program KIP Kuliah secara menyeluruh dan mendalam.

Penelitian ini menggunakan teori evaluasi dampak dari Finterbush and Motz (1993) dalam Samodra Wibawa (1994) yang mana teori ini komprehensif dalam membahas dampak program dari berbagai bidang seperti individu, organisasi, ekonomi, dan masyarakat. sehingga hasil dari evaluasi dampak program KIP Kuliah mampu digambarkan secara menyeluruh dan mendalam.

## **1.10 Metode Penelitian**

### **1.10.1 Tipe Penelitian**

Menurut Sugiyono (2003) terdapat beberapa tipe penelitian, yaitu :

#### **1. Penelitian Eksploratif**

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam informasi mengenai gejala yang terjadi, dengan tujuan merumuskan masalah, fenomena, atau gejala yang sebelumnya belum pernah diketahui.

#### **2. Penelitian Eksplanatif**

Penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam alasan di balik terjadinya suatu peristiwa dan menemukan hubungan sebab akibat dari hasil penelitian tersebut.

#### **3. Penelitian Deskriptif**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menggambarkan suatu gejala sosial tertentu dengan cara membandingkan gejala yang ditemukan dengan secara detail. Hasil dari penelitian ini berupa pola atau tipologi mengenai fenomena yang sedang diteliti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan fenomena kejadian yang berlangsung secara mendetail

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif ini digunakan karena mudah untuk menyesuaikan apabila dihadapkan dengan kenyataan yang lebih dari satu, metode ini menyajikan hakekat hubungan antara peneliti dan responden secara langsung. Penelitian yang berjudul “Evaluasi Dampak Program KIP Kuliah di Universitas Diponegoro”

merupakan penelitian deskriptif kualitatif karena menggambarkan gejala sosial mengenai dampak program KIP Kuliah di Universitas Diponegoro.

#### **1.10.2 Situs Penelitian**

Situs penelitian merupakan lokasi atau tempat yang digunakan peneliti dalam memperoleh data dan informasi mengenai keadaan yang sebenarnya terjadi pada suatu objek. Berdasarkan fokus penelitian yang digunakan peneliti, yaitu evaluasi dampak program KIP Kuliah di Universitas Diponegoro, maka lokus penelitiannya berada di Universitas Diponegoro yang terletak di Jalan Prof. Sudarto No.13, Tembalang Kota Semarang.

#### **1.10.3 Subjek Penelitian**

Menurut Suharsimi Arikunto (2010) subjek penelitian adalah batasan penelitian di mana peneliti bisa menentukannya baik dengan benda, hal atau secara langsung dengan orang sesuai dengan fenomena penelitian. Pemilihan subjek penelitian harus berdasarkan pada orang-orang yang mengetahui kebenaran dari suatu masalah yang dihadapi. Subjek penelitian merupakan orang-orang yang membantu dalam memberikan informasi untuk mengumpulkan data secara mendalam dan sesuai.

Subjek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Direktur Kemahasiswaan, dan Alumni Universitas Diponegoro
2. Manajer Bagian Kemahasiswaan
3. Operator KIP Kuliah
4. Kamadiksi KIP Kuliah Universitas Diponegoro
5. Mahasiswa Penerima beasiswa KIP Kuliah Universitas Diponegoro

6. Masyarakat umum (Orang tua mahasiswa penerima KIP-K, Alumni, dan masyarakat umum)

#### **1.10.4 Jenis Data**

Menurut Sugiono dalam Muh. Quraisy Mathir (2013) menjelaskan tipe penelitian dibagi menjadi dua yaitu :

1. Data Kualitatif

Data kualitatif merupakan data yang berbentuk kalimat, huruf, kata, atau gambar. Data yang bersifat deskriptif dan tidak berbentuk angka. Data ini digunakan untuk memahami konsep, opini, atau pengalaman yang tidak dapat diukur secara statistik. Data kualitatif sering diperoleh melalui wawancara, observasi, atau studi dokumen.

2. Data Kuantitatif

Data Kuantitatif adalah jenis data yang berbentuk angka dan dapat dihitung atau dianalisis secara statistik. Data ini digunakan untuk mengukur fenomena tertentu secara objektif dan sering dikumpulkan melalui survei, eksperimen, atau pencatatan data numerik.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif dalam bentuk gambar, kata, kalimat maupun grafik untuk menganalisis dampak program KIP Kuliah di Universitas Diponegoro.

#### **1.10.5 Sumber Data**

Sumber data adalah subjek dari mana data itu diperoleh. Dalam upaya untuk mendapatkan informasi terdapat dua hal data (Fiantika, 2022) yang dapat

dijadikan sebagai acuan pengambilan data, yaitu data primer dan sekunder. Penjelasan lebih lanjut sebagai berikut.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari wawancara peneliti dengan informan dengan instrumen yang telah disiapkan dan hasilnya diolah sendiri untuk menjawab permasalahan yang diteliti oleh peneliti. Pada penelitian ini informan yang digunakan untuk memberikan data primer adalah Pejabat Biro Akademik dan Kemahasiswaan, Kamadiski KIP Kuliah Universitas Diponegoro, Mahasiswa penerima KIP Kuliah dan Masyarakat.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung atau data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, diolah dan dipublikasikan untuk kepentingan tertentu. Dalam hal ini, peneliti hanya berperan sebagai pihak kedua yang mencatat, menerima dan mengakses data tersebut dari pihak lain yang bertanggung jawab atas datanya. Data sekunder yang diperoleh peneliti bersumber dari catatan-catatan, buku, dokumen, laporan, artikel, jurnal ilmiah dan sumber lain yang berhubungan dengan penelitian peneliti.

#### **1.10.6 Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data merupakan cara atau teknik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data menggunakan instrumen yang sudah ditetapkan. Instrumen adalah alat bantu pengumpulan data agar data yang diperoleh lebih

sistematis. Prosedur yang dipakai dalam pengumpulan data menurut Nasution (2023) sebagai berikut.

- 1) Observasi

Observasi adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti secara langsung sebelum melakukan penelitian tentang Evaluasi dampak Program KIP Kuliah di Universitas Diponegoro dengan mencatat keadaan sebenarnya yang ada di objek penelitian.

- 2) Wawancara

Wawancara merupakan proses pengumpulan informasi dengan berkomunikasi langsung kepada informan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data yang relevan dan terhubung langsung dengan topik yang sedang diteliti yaitu evaluasi dampak program KIP Kuliah di Universitas Diponegoro.

Dalam rangka mempermudah proses wawancara, peneliti menggunakan wawancara terstruktur dengan panduan berupa pedoman wawancara. Pedoman wawancara dilakukan dari pihak atas atau pembuat kebijakan yaitu Biro Akademik dan Kemahasiswaan sampai dengan pihak paling bawah atau implementor yaitu mahasiswa penerima beasiswa KIP Kuliah. Melalui wawancara diharapkan peneliti dapat memperoleh data dan pengetahuan secara mendalam tentang permasalahan yang terjadi dilapangan, dimana hal ini tidak bisa ditemui apabila hanya dilakukan dengan observasi.

- 3) Dokumentasi

Teknik pengumpulan data berupa dokumentasi adalah teknik yang digunakan untuk memperkuat data-data lapangan sebagai bukti yang akurat. Analisis dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang berasal dari arsip atau dokumen, baik dari lokasi penelitian maupun sumber di luar lokasi tersebut. Dalam hal ini peneliti memanfaatkan dokumentasi informasi yang bersumber dari Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) universitas dan memanfaatkan media *twitter*, *instagram*, serta *situs internet* sebagai informasi berupa dokumentasi. Sehingga data yang diperoleh penulis bersifat akurat.

#### **1.10.7 Analisis Interpretasi Data**

Analisis data sangat penting dilakukan untuk menjamin keabsahan sebuah data penelitian. Banyaknya data yang diperoleh harus dianalisis lebih lanjut agar dapat menghasilkan interpretasi dalam penelitian. Terdapat 3 komponen penting dalam teknik analisis data yaitu, reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. (Miles dan Huberman dalam sugiyono 2011). Adapun penjelasan lebih lanjut sebagai berikut :

##### **1) Reduksi data (data reduction)**

Reduksi data merupakan komponen pertama dalam analisis data. Hal ini dimaksudkan adalah pada reduksi data akan dilakukan analisis data secara mendalam untuk memperpendek, mempertegas, membuat fokus, dan mengatur sedemikian rupa data dapat digunakan dengan menghilangkan hal yang tidak penting. Dalam data yang diperoleh peneliti pada lapangan,

peneliti harus mengelompokkan data yang diperoleh sesuai dengan fokus penelitian sehingga data dapat terarah dan kuat.

2) Sajian data (data display)

Sajian data adalah sebuah sajian informasi sementara yang menggambarkan kesimpulan secara singkat atas penelitian yang diambil. Hal disini adalah kondisi data setelah dianalisis menjadi sistematis dan logis sehingga bisa menggambarkan makna peristiwa yang mudah dipahami.

3) Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan hal paling akhir pada proses analisis data. Setelah melalui tahapan reduksi data dan sajian data maka data yang diperoleh sudah berbentuk sistematis dan sederhana. Sehingga pada tahap kesimpulan ada tahapan merumuskan hasil akhir analisis data yang bisa dipertanggung jawabkan.

#### **1.10.8 Kualitas Data**

Kualitas data merupakan bagian dari proses pengelolaan data, kualitas data ini mempunyai penjelasan mengenai sebuah keakuratan dan kelengkapan data yang sudah diberikan. Selain itu, bahwa kualitas data ini juga berhubungan mengenai konsistensi dan juga ketepatan waktu yang diambil dalam memperkuat argumen atau permasalahan yang sedang dibahas. Kelengkapan data dalam hal ini memberikan penjelasan bahwa informasi yang diberikan dapat mewakili atau melengkapi seriap keadaan sebenarnya dan tidak berupa data yang mengada-ngada (spekulasi penulis).

Salah satu cara yang digunakan peneliti dalam menguji kualitas atau kredibilitas data adalah dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai cara dan waktu dalam menganalisis data penelitian. (Sugiyono dalam Habayahan et al., 2021). Adapun Sugiyono membagi triangulasi kedalam tiga macam sebagai berikut :

1) Triangulasi Sumber

Merupakan sebuah kegiatan melakukan pengecekan kembali data yang diperoleh dari berbagai sumber akan dianalisis oleh peneliti untuk menghasilkan kesimpulan dan temuan yang selaras dengan informasi dari sumber-sumber tersebut. Dalam hal ini, harus dilakukan upaya pemahaman dari hasil analisis untuk selanjutnya dikerucutkan dan disesuaikan dengan kesimpulan yang paling mendekati sumber dan saling berhubungan.

2) Triangulasi Teknik/cara

Merupakan bentuk kegiatan melakukan pengecekan kepada data dengan sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Cara yang dilakukan bisa dengan observasi, dokumentasi dan kuisioner. Namun apabila cara tersebut masih belum bisa membuktikannya, maka dapat dilakukan dengan diskusi data dengan sumber perolehan data. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya pengujian kredibilitas data.

### 3) Triangulasi Waktu

Kredibilitas atau kualitas data selain dapat diuji melalui sumber dan teknik, juga harus diujikan melalui triangulasi waktu. Triangulasi waktu merupakan pengujian perolehan data dengan mengacu pada waktu pengambilan data. Hal yang dapat dilakukan untuk menguji kredibilitas data dengan waktu ini dengan cara mekanisme wawancara, observasi, maupun menggunakan teknik lain dalam waktu yang berbeda. Apabila ditemukan data yang berbeda maka dapat dilakukan pengujian secara berulang sehingga dapat ditemukan kepastian datanya.

Pada penelitian ini, untuk membuktikan kredibilitas data maka menurut peneliti paling tepat adalah dengan menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber dapat dilakukan melalui pihak pertama sebagai pembuat kebijakan dan pihak kedua sebagai pelaksana kebijakan. Dalam hal ini sumber utama atau pihak pertama disini adalah Pejabat dan Pengelola Beasiswa KIP Kuliah Universitas Diponegoro, dan sumber pihak kedua adalah Mahasiswa penerima beasiswa KIP Kuliah di Universitas Diponegoro.